

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh prioritas jenis dan bentuk insentif serta kemudahan penanaman modal sebagai upaya peningkatan iklim investasi dan juga sebagai bentuk pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Banyumas. Hal ini dilakukan dengan metode AHP, dimana para expert memberikan penilaian terhadap kriteria dan alternatif yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dari penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, berikut adalah paparannya:

1. Jenis insentif pada penelitian ini adalah usaha atau kegiatan investasi yang didasarkan pada spesifikasi wilayah. Terdapat 4 klasifikasi wilayah investasi yaitu maju, potensial, berkembang dan terbelakang.
2. Bentuk insentif dan kemudahan yang tepat diterapkan di wilayah maju adalah kemudahan akses pelayanan. Kemudahan akses pelayanan yang dimaksudkan disini adalah lebih mengarah pada penyederhanaan dan percepatan perizinan, penyediaan data dan informasi peluang investasi, serta kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk insentif dan kemudahan yang tepat diterapkan di wilayah potensial adalah bantuan keuangan. Berdasarkan tinjauan kebijakan terhadap variasi bentuk insentif dan kemudahan bantuan keuangan yang dimaksudkan adalah mengarah kepada pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah. Wilayah potensial memiliki bidang usaha dominan yaitu pengolahan sumberdaya alam (pariwisata) dan industri. Sehingga bentuk insentif dan kemudahan yang tepat di wilayah ini adalah pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah.
4. Bantuan penyediaan sarana dan prasarana merupakan bentuk insentif dan kemudahan yang cocok diterapkan di wilayah berkembang. Hal ini

disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang masuk akan menghambat pelayanan sarana dan prasarana yang telah ada.

5. Bantuan keuangan merupakan bentuk insentif dan kemudahan yang cocok diterapkan di wilayah terbelakang. Bantuan Keuangan disini berbeda dengan wilayah potensial. Pada wilayah terbelakang mengarah kepada bunga pinjaman rendah, pemberian kompensasi, dan bantuan fasilitas pelatihan usaha mikro, kecil, atau koperasi. Hal ini dikarenakan wilayah terbelakang memiliki bidang usaha dominan adalah pertanian, peternakan dan UMKM pengolahan makanan. Sehingga bentuk insentif dan kemudahan yang tepat di wilayah ini adalah mengarah pada bantuan pelatihan skill dan bantuan pinjaman.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab penutup ini, yang menyatakan bahwa jenis dan bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal Kabupaten Banyumas adalah usaha yang didasarkan pada spesifikasi lokasi. Maka penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang berguna untuk analisis AHP tentang Kajian Pemberian Jenis dan Bentuk Insentif Pada Sasaran Wilayah Investasi pada suatu wilayah di masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa rekomendasi yang dihasilkan:

1. Kepada peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian lebih lanjut pada pengelompokan jenis dan bentuk insentif serta kemudahan penanaman modal karena dimungkinkan adanya perubahan kebijakan terkait insentif dan kemudahan penanaman modal di masa yang akan datang.
2. Jurnal yang mengkaji penggabungan analisis pengembangan wilayah dan analisis insentif dan kemudahan penanaman modal masih sangat sedikit jumlahnya. Sehingga masih diperlukan eksplorasi lebih lanjut terkait topik pembahasan ini.
3. Kepada peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan fenomena PDRB Kabupaten Banyumas sudah dikatakan tinggi. Apakah masih perlu PMA masuk dalam kegiatan investasi, sedangkan tanpa modal asing kegiatan investasi Banyumas masih bisa berjalan. Apabila masih memerlukan PMA, dalam bentuk apa dan bagaimana?
4. Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan wilayah dengan perkembangan rendah, hal ini dikarenakan untuk tercapainya pemerataan pembangunan dan peningkatan iklim investasi. Pemerintah daerah dapat merealisasikan hal tersebut dengan membuat kebijakan pemberian insentif dan memperbanyak bentuk dan jenis insentif yang ditawarkan. Sehingga minat investor dalam mendirikan usaha meningkat.
5. Kepada pemberi kebijakan terutama Pemerintah Daerah yang turun langsung mengurus masalah investasi dan kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal, dalam hal pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan lambatnya proses perizinan, yang mengakibatkan

terhambatnya kegiatan penanaman modal. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dalam hal proses perizinan.

6. Pemberian jenis dan bentuk insentif serta kemudahan penanaman modal masih minim, hal ini mempengaruhi minat investor. Sehingga tujuan dari pemberian insentif dan kemudahan untuk meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pengkajian ulang terkait kebijakan pemberian insentif dan kemudahan agar tujuan yang direncanakan dapat terealisasi.